

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Afrizal, M. A., *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta, Indonesia: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *PENELITIAN HUKUM NORMATIF: Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Poernomo, Bambang, *POLA DASAR TEORI-ASAS UMUM HUKUM ACARA PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta., Jakarta, 2008.
- DR. Nikmah, Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, Aura CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019.
- Rozah, U., *Azas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2015.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakty, Bandung, 2006.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia, 1983.
- Topo Santosa, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, Ind-Hill, 1997.
- Salim HS., Erlies S Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2006.
- S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia) Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi TNI.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer.

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

Sodikin, N., Eksistensi Asas Kepentingan Militer Dalam Penjatuhan Hukum Disiplin Guna Menjaga Profesionalitas Dan Disiplin Prajurit. *Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 2021.

Nitit, Y. W., & Saksono, M. S., Prinsip dan Dinamika Sistem Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Keikutsertaan Rakyat. *Jurnal Mahatvavirya*, Vol. 10, No. 1, 2021.

Huda, A. K. N., & Abdullah, S., Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 4, 2024.

Andrizal, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2014.

Gani, R. A., Koneksitas Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Militer. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 12 No. 1, 2018.

Niken Subekti, Supriyadi, Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana”. *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, 2014.

- Wicaksono, A., Sagala, P., & Jaeni, A., Penerapan Asas Kepentingan Militer terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Mulyadi, H., Penerapan Asas Kepentingan Militer dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Militer I-03/Padang. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Sasmito, J. Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer. *Perspektif*, Vol. 20, No. 1, 2015.
- Laksmidewi, N. L. A. W., & Adiyaryani, N. N., Kekhususan Dalam Tahapan Penyerahan Perkara Di Peradilan Militer. *Jurnal Pemuliaan Keadilan*, Vol. 1, 2024.
- Sugiyanto, E., & Pujiyono, B. W., Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- John Kenedi, Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, Vol. XII, No. 1, 2019.
- Lakbanu, D. B., Asa, S., & Resopijani, A., Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer. *Petitum Law Journal*, Vol. 2 No. 1 2024.
- Aliah, F., & Jamil, J., Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) Di Lingkungan Pengadilan Militer Iii-16 Makassar. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 3, 2021.
- Utami, S. N., Isma, A. N., & Jodi, F. F., Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol 2, No. 1, 2024.
- Isnantiana, N. I., Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamidina: Jurnal Pemikiran Islam*, 2017, Vol. 18, No. 2.
- Bahiej, A., Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Sosio-Relegia*, Vol. 2, No. 2, 2003.

- Reinati, E. S. D., Leo, R. P., & Amalo, H., Tinjauan Kriminologi terhadap Perzinahan yang Dilakukan oleh Anggota TNI dengan Istri Sesama Anggota TNI. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, No. 6, 2023.
- Mulyadi, H., Penerapan Asas Kepentingan Militer dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Militer I-03/Padang, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Sulistiyo, A. P., Sriwidodo, J., & Mau, H. A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI Yang Disersi. *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Chalim, M. A., & Farhan, F. (2015). Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di Tinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 2, No.1, 2015.
- Zuhdi, M., & Siswanto, M., Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/142-K/AD/XII/2020). *Jurnal Yustitia*, 2022.
- Jaya, F. Y. O. E., Peranan Oditur Militer Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Oleh Anggota Militer Terhadap Keluarga Besar Tni (KBT). *Kerta Dyatmika*, Vol. 18 No. 2, 2021.
- Sagala, P., & Ferdian, F., Yurisdiksi peradilan militer dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. *E-Journal Peradilan Militer*, 2017.
- Maharani, A. C., Panjaitan, R. N., Ramadhan, N. A., Ledewedjo, J. L. A., Mawene, M. J., & Triadi, I., Perbandingan Pidana Pemecatan umum dengan Pidana Militer dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 2, 2025.
- Sarayar, R. R., Jenis-jenis Pidana dan Pelaksanaan Pidana dalam Hukum Pidana Militer. *LEX CRIMEN*, Vol. 7, No. 8, 2018.
- Yunianti, N., Syarifuddin, L., & Erawaty, R., Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pemecatan Terhadap Prajurit Tni Dalam Perkara Asusila. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 13, No. 2, 2025.
- Sastrawan, K. W., Surata, I. N., Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Pada Pengadilan Militer Iii-14 Denpasar. *Kertha Widya*, Vol. 3, No. 1, 2015.

Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, *Malang Bayu Media*, 2007.

Skripsi

Kurniawan, A., Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Militer (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14/K-AD/PMT/-II/VI/2010). *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013.

Marey, M. M. R., Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Pengadilan Militer Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Linorangatau, B. A., Pengaruh Asas Kesatuan Komando Dalam Proses Peradilan Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer, *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

